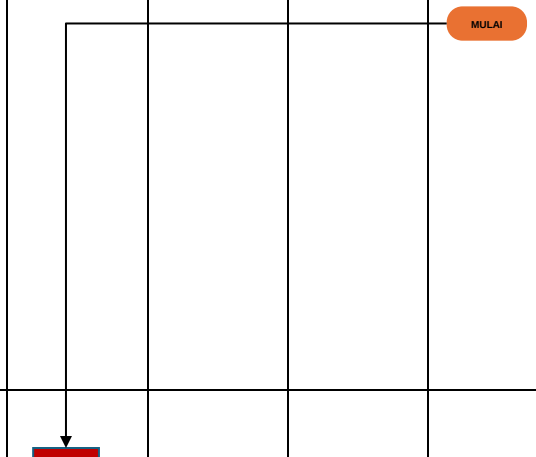
KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nomor SOP	SEK-OT.02.02-179
Tanggal Pembuatan	15 OKTOBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 November 2025
Disahkan oleh	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
Nama SOP	**Permohonan Perubahan Belanja SPBE di Tahun Pelaksanaan dalam rangka Pemberian Rekomendasi *(Clearance)* di Lingkungan Kementerian Hukum**

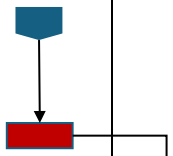
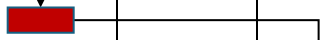
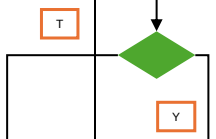
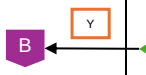
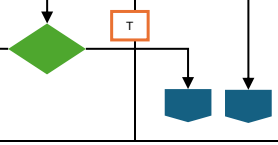
Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 3 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949); 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 7 Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 8 Tahun 2024 Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dalam rangka Pemberian Rekomendasi (Clearance) untuk mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	Memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan perubahan belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tahun pelaksanaan di Lingkungan Kementerian Hukum dalam rangka pemberian rekomendasi (*clearance*).
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
	1. Surat permohonan rekomendasi (*clearance*); 2. Arsitektur SPBE Kementerian Hukum; 3. Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum; 4. Dokumen pendukung permohonan rekomendasi *(clearance)*.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengajuan permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dalam rangka pemberian rekomendasi (*clearance*) di lingkungan Kementerian Hukum dapat terhambat dikarenakan adanya kesalahan dalam alur koordinasi.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSES PERUBAHAN BELANJA SPBE DI TAHUN PELAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN REKOMENDASI *(CLEARANCE)* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekjen	Kapusdatin	Tim Kerja	Unit Utama	Tim *Clearance* Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dalam rangka pemberian rekomendasi *(clearance)* di lingkungan Kementerian Hukum						1. SEB MenPANRB, MenKominfo, MenPPN/KaBappenas Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 8 Tahun 2024, dan Nomor 3 Tahun 2024; 2. Tangkapan layar terkait input data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE).	1 jam	Surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dalam rangka pemberian rekomendasi *(clearance)* dari Unit Utama (UKE 1) dengan melampirkan: 1. Rincian belanja SPBE meliputi: nama item belanja SPBE, jenis belanja SPBE (belanja data, belanja aplikasi, belanja infrastruktur, atau belanja non-teknis, jumlah anggaran, hasil rekomendasi *clearance* sebelumnya (jika ada); 2. Dokumen KAK yang telah ditandatangani; 3. Tangkapan layar terkait input data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE). 4. Matriks perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan, meliputi: nama item belanja SPBE semula-menjadi, volume semula-menjadi, jumlah anggaran semula-menjadi, spesifikasi teknis semula-menjadi, ruang lingkup semula-menjadi.	Surat disampaikan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) dengan tembusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin)
2	Disposisi Sekjen ke Kapusdatin terkait tindak lanjut surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dari UKE 1						Surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dari UKE 1	1 jam	1. Disposisi/arahan Sekjen kepada Kapusdatin; 2. Surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dari UKE 1.	
3	Disposisi Kapusdatin ke Tim Kerja						1. Disposisi/arahan Sekjen kepada Kapusdatin; 2. Surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dari UKE 1.	1 jam	1. Disposisi/arahan Kapusdatin kepada Tim Kerja; 2. Surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dari UKE 1.	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekjen	Kapusdatin	Tim Kerja	Unit Utama	Tim *Clearance* Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Memeriksa matriks perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan						1. Disposisi/arahan Kapusdatin kepada Tim Kerja; 2. Surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dari UKE 1.	1 jam	Hasil pemeriksaan matriks perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan	**T**: Matriks perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan tidak memenuhi kriteria dalam perubahan belanja SPBE. **Y**: Matriks perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan memenuhi kriteria dalam perubahan belanja SPBE.
5	Memeriksa kesesuaian antara surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1 dengan kriteria belanja SPBE						1. Disposisi/arahan Kapusdatin kepada Tim Kerja; 2. Surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dari UKE 1.	1 jam	Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan kriteria belanja SPBE	**T**: Item perubahan belanja SPBE yang diajukan dalam surat tidak masuk ke dalam kriteria belanja SPBE; **Y**: Item perubahan belanja SPBE yang diajukan dalam surat masuk ke dalam kriteria belanja SPBE.
6	Memeriksa keselarasan antara surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1 dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum						1. Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan kriteria belanja SPBE; 2. Surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dari UKE 1; 3. Arsitektur SPBE Kementerian Hukum; 4. Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum.	1 jam	Hasil pemeriksaan keselarasan dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum	**T**: Item perubahan belanja SPBE yang diajukan dalam surat tidak selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum; **Y**: Item perubahan belanja SPBE yang diajukan dalam surat selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum.
7	Memastikan data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE telah terinput di dalam aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE)						Hasil pemeriksaan keselarasan dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum	2 jam	Hasil pengecekan data Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum dalam aplikasi SIA SPBE	**T**: Data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE belum terinput secara lengkap dalam aplikasi SIA SPBE; **Y**: Data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE telah terinput secara lengkap dalam aplikasi SIA SPBE.
8	Melengkapi data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada aplikasi SIA SPBE						Hasil pengecekan data Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum dalam aplikasi SIA SPBE	4 jam	Data Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum telah terinput secara lengkap dalam aplikasi SIA SPBE	
9	Menyiapkan konsep surat tanggapan atas permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1						1. Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan kriteria belanja SPBE; 2. Hasil pemeriksaan keselarasan dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum. 3. Hasil pemeriksaan matriks perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan	1 jam	Konsep surat tanggapan atas permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekjen	Kapusdatin	Tim Kerja	Unit Utama	Tim *Clearance* Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Memeriksa dan Persetujuan Konsep Surat tanggapan atas permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1						Konsep surat tanggapan atas permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1	1 hari	Surat tanggapan atas permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1 yang telah disetujui	
11	Menyampaikan surat tanggapan atas permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1			A			Surat tanggapan atas permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1 yang telah disetujui	1 jam	Surat tanggapan atas perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan UKE 1	
12	Menyiapkan konsep surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di lingkungan Kementerian hukum yang akan ditandatangani oleh Sekjen dan ditujukan kepada Tim *Clearance* Pusat		T				Surat permohonan perubahan belanja SPBE di tahun pelaksanaan dari UKE 1	1 hari	Konsep surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dengan melampirkan informasi berikut : nama UKE 1, nama item belanja SPBE; jenis belanja SPBE (belanja data, belanja aplikasi, belanja infrastruktur, atau belanja non-teknis); jumlah anggaran.	
13	Memeriksa Konsep Surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE	Y					Konsep surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di lingkungan Kementerian Hukum	1 jam	Konsep surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di lingkungan Kementerian Hukum	**T**: Konsep surat perlu diperbaiki; **Y**: Konsep surat sudah disetujui.
14	Menerbitkan surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di lingkungan Kementerian Hukum yang ditandatangani oleh Sekjen						Konsep surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di lingkungan Kementerian Hukum	1 jam	Surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di lingkungan Kementerian Hukum	
15	Arahan menindaklanjuti surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE yang telah di tanda tangani Sekjen						Surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di lingkungan Kementerian Hukum	1 jam	Arahan tindak lanjut surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekjen	Kapusdatin	Tim Kerja	Unit Utama	Tim *Clearance* Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
16	Mengunggah dokumen utama permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE ke aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE						1. Surat permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di lingkungan Kementerian Hukum; 2. Arsitektur SPBE Kementerian Hukum; 3. Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum.	1 jam	Dokumen utama permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE yang telah diunggah ke Aplikasi EGA SPBE	Dilakukan pada aplikasi EGA SPBE
17	Menambah kegiatan belanja SPBE sesuai jenis belanja SPBE dengan melakukan input isian atribut metadata pada seluruh domain arsitektur SPBE serta mengunggah dokumen pendukung permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE dalam aplikasi EGA SPBE						1. Dokumen utama permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE yang telah diunggah ke aplikasi EGA SPBE; 2. Isian Atribut metadata yang dilengkapi sesuai domain arsitektur SPBE; 3. Dokumen pendukung permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sesuai jenis belanja mengacu pada SEB MenPANRB, MenKominfo, MenPPN/KaBappenas Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 8 Tahun 2024, dan Nomor 3 Tahun 2024.	4 hari	Data permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE yang telah diunggah ke aplikasi EGA SPBE	Sebelum tambah kegiatan belanja SPBE, data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE harus sudah terinput secara lengkap dalam aplikasi SIA SPBE, dikarenakan aplikasi EGA SPBE sudah terintegrasi dengan aplikasi SIA SPBE untuk mengambil data tersebut.
18	Melakukan submit data permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE untuk diverifikasi oleh Tim *Clearance* Pusat						Data permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE yang telah diunggah ke aplikasi EGA SPBE	1 jam	Data permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE yang telah di-submit	
19	Melakukan verifikasi permohonan rekomendasi *(clearance)* oleh Tim *Clearance* Pusat						Data permohonan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE yang telah di-submit	15 hari	Hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara	**T**: Hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara tidak dapat dilanjutkan; **Y**: Hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara dapat dilanjutkan.
20	Mengajukan konfirmasi terhadap hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE						Hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara	1 hari	Konfirmasi hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara	**T**: Tidak setuju dengan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara; **Y**: Setuju dengan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekjen	Kapusdatin	Tim Kerja	Unit Utama	Tim *Clearance* Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
21	Melaksanakan rapat pembahasan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara bersama Tim *Clearance* Pusat						Konfirmasi hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara	2 hari	Hasil pembahasan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara	
22	Menerbitkan Berita Acara hasil pembahasan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara						Hasil pembahasan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara	1 hari	Berita Acara hasil pembahasan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara	
23	Menerbitkan surat penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran *(Clearance)* belanja SPBE di Lingkup Kementerian Hukum oleh Menteri PANRB, Menteri Kominfo dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas melalui aplikasi EGA SPBE					B	Hasil pembahasan rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE sementara	1 hari	Surat penyampaian hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di Lingkup Kementerian Hukum	Dilakukan pada aplikasi EGA SPBE
24	Mengunduh Hasil Evaluasi Anggaran *(Clearance)* belanja SPBE di Lingkup Kementerian Hukum						Surat penyampaian hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di Lingkup Kementerian Hukum	1 jam	Surat penyampaian hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di Lingkup Kementerian Hukum	Dilakukan pada aplikasi EGA SPBE
25	Menyampaikan Hasil Evaluasi Anggaran *(Clearance)* belanja SPBE di Lingkup Kementerian Hukum	A					Surat penyampaian hasil rekomendasi *(clearance)* belanja SPBE di Lingkup Kementerian Hukum	1 hari	Surat hasil rekomendasi (clearance) belanja SPBE di Lingkup Kementerian Hukum diterima.	
26	Selesai	SELESAI								